



Universitas Katolik Parahyangan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana

Terakreditasi A

SK BAN-PT No. 2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Media Dalam Mempengaruhi Sikap Terhadap Jepang
Pasca Penjajahan: Studi Kasus The Jakarta Post dan
The Hankyoreh**

Skripsi

Oleh

Rotua Isaura Yemima
6091901042

Bandung

2022



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Hubungan Internasional

Terakreditasi A
SK BAN-PT No. 2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

Media Dalam Mempengaruhi Sikap Terhadap Jepang
Pasca Penjajahan: Studi Kasus The Jakarta Post dan
The Hankyoreh

Skripsi

Oleh

Rotua Isaura Yemima
6091901042

Pembimbing

Mireille Marcia Karman S.Sos., M.Litt.

Bandung

2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Rotua Isaura Yemima
Nomor Pokok : 6091901042
Judul : Media Dalam Mempengaruhi Sikap Terhadap Jepang Pasca
Penjajahan: Studi Kasus The Jakarta Post dan The Hankyoreh

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Rabu, 18 Januari 2023
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Sapta Dwikardana, Ph.D.

: _____

Sekretaris

Mireille Marcia Karman, S.Sos., M.Litt.

: _____

Anggota

Dr. Atom Ginting Munthe, M.S.

: _____

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

Pernyataan

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rotua Isaura Yemima

NPM : 6091901042

Jurusan/Program Studi : Hubungan Internasional

Judul : Media Dalam Mempengaruhi Sikap Terhadap Jepang Pasca Penjajahan: Studi Kasus The Jakarta Post dan The Hankyoreh

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 30 Maret 2023



Rotua Isaura Yemima

ABSTRAK

Nama: Rotua Isaura Yemima

NPM: 6091901042

Judul: Media Dalam Mempengaruhi Sikap Terhadap Jepang Pasca Penjajahan: Studi Kasus The Jakarta Post dan The Hankyoreh

Jepang merupakan salah satu negara yang melakukan praktik kolonialisme pada Perang Dunia Kedua dengan Indonesia dan Korea Selatan yang menjadi contoh dari negara yang dulu pernah terjajah. Namun, sebagai negara yang pernah terjajah, Indonesia dan Korea Selatan memiliki sikap yang berbeda terhadap Jepang pasca penjajahan walau kedua negara tersebut memiliki banyak persamaan dalam aspek historis dan politiknya. Adanya nilai nasionalisme memainkan peran dalam perbedaan sikap kedua negara terhadap Jepang pasca penjajahan dimana berdasarkan teori peluang fenomena nasionalisme dapat dilihat bahwa nasionalisme Korea Selatan lebih kuat dibandingkan Indonesia. Selain itu, media sebagai aktor dalam Hubungan Internasional memiliki peran yang besar dalam menyiarkan berita mengenai hubungan Indonesia dan Korea Selatan dengan Jepang yang mempengaruhi sikap kedua negara pasca penjajahan dengan menggunakan *framing*. Maka dari itu, adanya nilai nasionalisme dan *framing* yang dilakukan dalam penyiaran hubungan Indonesia dan Korea Selatan berpengaruh kepada perbedaan impresi kedua negara terhadap Jepang yang berkaitan dengan disimilaritas sikap.

Kata kunci: *framing*, nasionalisme, sikap, Indonesia, Korea Selatan

ABSTRACT

Name: Rotua Isaura Yemima

Student ID: 6091901042

Title: The Media In Influencing Attitudes Toward Post-Colonial Japan: Case Studies The Jakarta Post and The Hankyoreh

Japan is one of the countries that practiced colonialism during the Second World War, with Indonesia and South Korea being examples of countries that were once colonized. However, as countries that were once colonized, Indonesia and South Korea have different attitudes towards post-colonial Japan even though the two countries have many similarities in historical and political aspects. The existence of the value of nationalism plays a role in the difference in attitudes of the two countries towards post-colonial Japan where based on the opportunity theory of the phenomenon of nationalism it can be seen that South Korean nationalism is stronger than Indonesia. In addition, the media as an actor in International Relations has a big role in broadcasting news about the relations between Indonesia and South Korea and Japan which influences the post-colonial attitudes of the two countries by using framing. Therefore, the existence of nationalism and framing values that are carried out in broadcasting relations between Indonesia and South Korea affect the differences in the impressions of the two countries towards Japan which are related to dissimilar attitudes.

Keywords: framing, nasionalism, attitude, Indonesia, South Korea

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Media Dalam Mempengaruhi Sikap Terhadap Jepang Pasca Penjajahan: Studi Kasus The Jakarta Post dan The Hankyoreh”. Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar akademik jenjang Sarjana Program Studi Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca dan penstudi Ilmu Hubungan Internasional yang tertarik dalam kajian bidang *Framing* dan Media Internasional. Penulis menyadari bahwa penelitian masih jauh dari sempurna. Maka dari itu, penulis mengucapkan permohonan maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam penelitian dan penulis terbuka untuk kritik dan saran yang membangun.

Bandung, 23 Desember 2022

Rotua Isaura Yemima

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih untuk Papa sudah menyekolahkan dan menyediakan bantuan finansial saya sampai jenjang ini. Terima kasih untuk *staycation*-nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Mohon bantuan untuk mencari pekerjaan kedepannya, hehe.

Terima kasih untuk Mama yang sudah membantu finansial dan menyediakan persediaan pangan serta sandang. Terima kasih untuk informasi dari link *instagram* HRD, informasi promo makanan, dan informasi lainnya. Selangkah lebih dekat ke villa di Bali.

Terima kasih untuk Mba Mirei selaku dosen pembimbing saya yang sudah membantu saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini sehingga saya bisa menyelesaikan studi di UNPAR dengan cepat.

Terima kasih untuk Mba Vrames selaku Kaprodi Hubungan Internasional Sarjana 1 yang sudah membantu saya dalam pengesahan skripsi sehingga saya bisa menyelesaikan studi di UNPAR dengan cepat.

Terima kasih kepada seluruh staf Universitas Katolik Parahyangan yang telah mempermudah proses pembelajaran saya di UNPAR sehingga bisa menyelesaikan studi di UNPAR dengan cepat.

Terima kasih kepada GirlsSquad (Keked dan TPL) serta Adis yang telah menjadi *support system* yang sangat membantu dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Semoga untuk kedepannya kita dapat selalu berbahagia bersama-sama dan membuat kenangan yang lebih banyak lagi.

Terima kasih kepada Jemberz (Adel sayang, Adis, Ceyril, Cindoy, Enjel, Icel, Mamih Jedoy, Om Wili, dan Sajol Ulala) yang telah menemani saya dari awal semester satu hingga saat ini dan selama-lamanya. Semoga kita selalu terhubung walau mungkin kita tersebar dari Sabang sampai Merauke. See you on top guys :)

Terima kasih kepada Kinoi, gogok kesayangan yang sudah menjadi *support system* dan sumber motivasi penulis untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan cepat. Sayang banget, mwah, mwah <3

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR SINGKATAN	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Pembatasan Masalah	11
1.4 Pertanyaan Penelitian	12
1.5 Tujuan Penelitian	13
1.6 Kegunaan Penelitian	13
1.7 Kajian Pustaka	14
1.8 Kerangka Teori	19
1.9 Metode Penelitian	25
1.10 Teknik Pengumpulan Data	26
1.11 Sistematika Penelitian	27
BAB 2 SEJARAH JEPANG SERTA NASIONALISME DI INDONESIA DAN KOREA SELATAN	28
2.1 Sejarah Kolonialisme Jepang	28
2.2 Sejarah Jepang Di Indonesia	29
2.3 Sejarah Jepang Di Korea Selatan	34
2.4 Kesepadanan Nasionalisme Indonesia dan Korea Selatan	39
2.5 Perbedaan Nasionalisme Indonesia dan Korea Selatan	42
BAB 3 HUBUNGAN INDONESIA DAN KOREA SELATAN DENGAN JEPANG	47
3.1 Jepang Dalam Media Berita Indonesia Dan Korea Selatan	47
3.1.1 The Jakarta Post Dan The Hankyoreh	47
3.1.2 Jepang Dalam The Jakarta Post Dan The Hankyoreh	48

	9
3.1.2.1 Jepang Dalam The Jakarta Post	48
3.1.2.2 Jepang Dalam The Hankyoreh	51
3.2 Peran Media Dalam Sikap Indonesia dan Korea Selatan Terhadap Jepang	55
3.3 Indonesia Dan Korea Selatan Dengan Jepang Saat Ini	58
BAB 4 KESIMPULAN	73
DAFTAR PUSTAKA	74

DAFTAR SINGKATAN

ACSA	: Acquisition and Cross-Servicing Agreements
ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nations</i>
CEPA	: Comprehensive Economic Partnership Agreement
GDP	: Gross Domestic Product
GSOMIA	: General Security of Military Information Agreement
HI	: Hubungan Internasional
IJEPA	: Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement IJEPA
IMF	: <i>International Monetary Fund</i>
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PM	: Perdana Menteri

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Hubungan interaksi antara negara di dunia sebagai tokoh sosial atau struktur hubungan aktor sebagai jenis makhluk sosial tertentu merupakan dua jenis hubungan sosial yang ada di ranah internasional. Hubungan sosial atau pola interaksi melihat bentuk kekuasaan mana yang bekerja dan menyebar secara sosial menjadi pembeda penting dalam melihat hubungan antara negara di dunia. Maka dari itu, untuk negara dapat membentuk kemampuan demi mengendalikan nasib mereka kekuatan dan kekuasaan sangat berperan besar yang dihasilkan di dalam dan melalui hubungan sosial.¹

Kajian sejarah yang membentuk catatan sejarah kuno dapat menghasilkan pengetahuan yang sulit diperoleh hanya dengan mempelajari sejarah yang menjadi latar belakang langsung masa kini karena dapat dipandang dengan objektivitas yang lebih besar dan intensitas yang lebih kecil. Tidak dapat disangkal bahwa peristiwa sejarah harus dipelajari dalam meneliti urusan internasional, tetapi penting untuk diingat bahwa dalam melakukan itu ada risiko yang dapat membatasi perspektif seseorang. Karena itu, untuk menjelaskan kondisi manusia adalah tujuan dari proses berpikir tradisional tentang sejarah sehingga kita sekarang dapat menggunakan semua sejarah tidak terbatas dengan wilayah untuk lebih memahami masa kini. Interaksi berkelanjutan antara perubahan dan stabilitas adalah sesuatu yang diajarkan sejarah kepada kita, sehingga

¹ Michael Barnett dan Raymond Duvall, "Power in International Politics," 2005, DOI: 10.1017/S0020818305050010

untuk memiliki pemahaman tentang bagaimana manusia dan peristiwa berinteraksi dalam situasi dunia saat ini sangat penting untuk disadari adanya argumen sejarah.²

Rasa kesinambungan peristiwa dalam studi Hubungan Internasional melalui studi sejarah menyadarkan akan konsep bahwa kesinambungan dan perubahan ada dari generasi ke generasi dengan para pemimpin dan seluruh negara terikat oleh masa lalu. Maka dari itu, bagi sebuah negara untuk dapat menjalin suatu interaksi dengan negara lain adanya peran dari sejarah akan memainkan bagian yang besar dalam menentukan landasan dan pondasi awal hubungan yang ingin dibentuk. Serta upaya oleh para ahli sejarawan untuk menemukan petunjuk atau pelajaran dari zaman lampau yang diargumentasikan oleh Hans Morgenthau dilihat sebagai hal yang masuk akal sehingga mempelajari sejarah untuk memahami bagaimana dunia kita muncul mulai ditekankan dalam sebagian besar studi Hubungan Internasional.³

Globalisasi memungkinkan munculnya masalah internasional modern yang semakin kompleks. Berbagai kekuatan global yang bersifat historis, politik, ekonomi, militer, dan sosial menjadi faktor yang membentuk dunia saat ini sehingga penting untuk memiliki pengetahuan dalam sejarah, ekonomi, sosiologi, antropologi, dan filsafat dalam menilai dan meneliti fenomena yang terjadi di dunia dalam studi Hubungan Internasional.⁴ Globalisasi yang semakin maju dan berkembang menjadikan pengetahuan yang kaya akan informasi, ide, dan inovasi sebagai fokus utama dari kekuatan global.⁵

² Arthur N. Gilbert, "International Relations and the Relevance of History," dalam *International Studies Quarterly*, Vol. 12, No. 4, 1968, DOI: 10.2307/3013522

³ *Ibid.*

⁴ "About IR", Lehigh University Department of International Relations, diakses pada 12 Maret 2022, <https://ir.cas.lehigh.edu/content/about-ir>

⁵ James Manyika, et al. *Digital Globalization: The New Era of Global Flows* (New York: McKinsey & Company, 2016), <https://www.mckinsey.com/~media/mckinsey/business%20functions/mckinsey%20digital/our%20insights/digital%20globalization%20the%20new%20era%20of%20global%20flows/mgi-digital-globalization-full-report.ashx>

Belakangan ini, di bidang diplomasi dan hubungan internasional, popularitas penggunaan permintaan maaf resmi telah meningkat dan bahkan dalam kasus konflik, negara sekarang diharapkan untuk meminta maaf atas kesalahan mereka. Permintaan maaf telah muncul sebagai senjata penting dalam hubungan internasional walaupun suasana perasaan bersalah, keresahan moral, dan kebutuhan akan rekonsiliasi tampaknya tidak mendapat tempat di dunia politik yang rasional dan didorong oleh agenda. Meski begitu, karena nilai-nilai seperti keadilan dan hak asasi manusia tidak dapat dihindari maka pelanggaran yang terjadi sebelumnya akan terus berlanjut dan membawa pengaruh sehingga waktu, tanggung jawab, dan rasa bersalah semuanya dilihat dalam pandangan yang kompleks karena sejarah terus membentuk identitas masa kini. Oleh karena itu, bahkan setelah bertahun-tahun, sebagai senjata politik permintaan maaf masih tetap berguna, penting, dan diperlukan.⁶

Permintaan maaf negara adalah alat penting dalam menumbuhkan kepercayaan dan rasa hormat diantara negara-negara setelah konflik dalam Hubungan Internasional dengan rekonsiliasi antar pihak sebagai tujuan utama baik secara individu maupun secara nasional. Maka dari itu, permintaan maaf memiliki beberapa dampak normatif dalam mempengaruhi sikap sebuah negara dan dapat digunakan sebagai tindakan resmi legislasi dengan konsekuensi hukum.⁷ Meskipun kolonialisme dilihat sebagai peristiwa pada masa lalu yang sudah lewat, namun warisan kolonialisme yang mengerikan terus hidup sampai hari ini menjadi fakta yang ada dan masih mempengaruhi.⁸

⁶ Tamar Farchy, "Why do countries apologize? Contrition and historical memory in international politics," 2018, <https://repositories.lib.utexas.edu/bitstream/handle/2152/65139/TamarFarchyThesis.pdf?sequence=2&isAllowed=y>

⁷ *Ibid.*

⁸ Abhyudaya Tyagi, "The Legacy of Colonialism: Why Colonial Power Must Apologize," 2019, <https://www.thegazelle.org/issue/171/opinion/the-legacy-of-colonialism-why-colonial-powers-must-apologize>

Tanggung jawab terhadap publik, rekonsiliasi, dan jaminan bahwa praktik-praktik yang merugikan tidak akan dilaksanakan lagi semuanya dapat menjadi tujuan dari permintaan maaf kolektif resmi. Pemerintah dan pemimpin, sampai batas tertentu, dianggap bertanggung jawab atas kesalahan dan penyesalannya bahkan tanpa adanya tindakan pengadilan. Rekonsiliasi antar negara dengan menyatakan prinsip-prinsip baru, mencela perilaku sebelumnya, dan bersumpah untuk mengambil tindakan yang berbeda dan lebih baik ke depan adalah hasil yang akan dicapai jika permintaan maaf dilakukan secara efektif.⁹

Selain itu, dengan melalui permintaan maaf, hal ini dapat dijadikan sebagai isyarat simbolis sebagai "penutupan" yang dicari oleh seluruh pihak yang bermasalah terutama pihak penerima yang membutuhkannya. Maka dari itu, nilai yang diberikan untuk membuat permintaan maaf disorot ketika kurangnya permintaan maaf dan respons yang ditimbulkan meningkatkan dorongan untuk segera dilaksanakan. Karena sifatnya yang dapat digunakan sebagai penenang luka atau memperparah luka menjadikan permintaan maaf atas kesalahan di masa lalu menjadi sebuah standar dan diminati. Permintaan maaf yang tulus dapat memicu diskusi yang hidup tentang sejarah dimana masyarakat dapat merefleksikan signifikansi historis dari peristiwa sebelumnya.¹⁰

Perubahan konsepsi tentang apa yang merupakan ketidakadilan historis pada generasi saat ini merupakan faktor utama yang mendorong gerakan untuk meminta maaf atas sejarah masa lalu. Fleksibilitas interpretatif sejarah pada umumnya dan dorongan revisionis kontemporer pada khususnya adalah akar penyebab periode apologetik. Saat ini, tujuan sejarah menjadi bahan

⁹ Daniella Stoltz dan Beth Van Schaack, "It's Never Too Late to Say 'I'm Sorry': Sovereign Apologies Over the Years," 2021, <https://www.justsecurity.org/75340/its-never-too-late-to-say-im-sorry-sovereign-apologies-over-the-years/>

¹⁰ Robert R. Weyeneth, "The Power of Apology and the Process of Historical Reconciliation," dalam *The Public Historian*, Vol. 23, No. 3, pp. 9-38, 2001, DOI: 10.1525/tph.2001.23.3.9

perdebatan dan negosiasi ulang, maka dari itu adanya sebuah permintaan maaf atas kesalahan masa lalu dinilai penting untuk membangun dan menulis ulang sejarah yang lebih baik.¹¹

Jika masyarakat sebuah negara merasa bahwa permintaan maaf politik atau ekspresi penyesalan telah diberikan maka mereka akan lebih mungkin untuk mendukung perbaikan hubungan. Masyarakat akan menganggap tindakan perbaikan hubungan akan bermanfaat demi bekerjasama dan melakukan mitra strategis yang signifikan. Masyarakat akan lebih mudah untuk dibujuk untuk menerima program aliansi yang kompleks dimana para pemimpin dapat melakukannya dengan menarik kepentingan strategis. Untuk itu, pentingnya strategis aliansi antara negara yang meminta maaf dan negara yang menerimanya berkaitan erat dengan nasionalisme, orientasi dominasi sosial, konservatisme, dan opini masyarakat.¹²

Untuk mendukung sistem progresif neokolonial atau untuk mempromosikan inklusi kelompok minoritas, pernyataan permintaan maaf memodifikasi narasi dan norma. Dalam mencapai tujuan politik tertentu seperti memperkuat standar sosial, permintaan maaf berubah menjadi senjata praktis yang dapat digunakan. Maka dari itu, secara fungsionalis dalam melakukan tujuan sosial untuk mempertahankan ketertiban adanya rasa penyesalan dan meminta maaf dianggap sebagai penegasan kembali norma-norma dan hierarki sosial saat ini daripada tindakan yang memenuhi tuntutan korban.¹³

Bagian penting dari memori komunal adalah bagaimana sejarah kolonial direpresentasikan. Teori emosi antar kelompok berpendapat bahwa emosi berbasis kelompok meningkatkan kemungkinan kecenderungan perilaku tertentu oleh negara yang mengkategorisasi

¹¹ *Ibid.*

¹² Risa Kitagawa dan Jonathan A. Chu, "The Impact of Political Apologies on Public Opinion," 2021, DOI:10.1017/s0043887121000083

¹³ Jasper Friedrich, "Settling Accounts at the End of History: A Nonideal Approach to State Apologies," dalam *Political Theory*, 50(5), 700–722, 2022, DOI: 10.1177/00905917211065064

diri sebagai anggota kelompok. Rasa lebih sentimental tentang masa lalu merupakan salah satu contohnya. Maka dari itu, cara terbaik untuk mempromosikan perdamaian dan pemberdayaan korban langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan melakukan permintaan maaf politik.¹⁴

Media sebagai salah aktor yang berperan dalam ranah Hubungan Internasional memiliki sembilan fungsi, yaitu: Memenuhi kebutuhan masyarakat akan berita dan informasi; Sebagai instrumen dalam mendidik masyarakat; Membantu keefektifan praktek demokrasi; Menghibur masyarakat; Mempengaruhi perubahan sosial dengan kekuatan yang dimiliki; Memfasilitasi konektivitas global; Iklan di media mendukung perdagangan dan industri; Sebagai instrumen dalam membantu sistem politik dan demokrasi suatu negara; dan membawa perbaikan sosial yang positif. Melihat dari sembilan fungsi sebelum, maka pandangan dan sikap masyarakat dapat dipengaruhi oleh media merupakan fungsi yang akan menjadi fokus dalam penelitian kali ini. Paparan media mengubah sikap atau pandangan orang dengan melihat korelasi yang signifikan dengan tingkat paparan merujuk pada efek media. Semakin banyak yang dilihat maka akan semakin kuat juga pengaruhnya merupakan premis mendasar dari teori perubahan.¹⁵

Asumsi bahwa ada sesuatu yang pasti hubungan antara komunikasi massa dan perubahan sosial menjadi dasar dari pendekatan sosiologis terhadap teori komunikasi dan salah satu contohnya adalah teori agenda *setting*. Dalam mendefinisikan dan mengklarifikasi aspek-aspek berikut tentang bagaimana cerita dipilih melewati bagaimana sebuah berita dikemas lalu dipresentasikan (*gatekeeping*) yang menciptakan sebuah agenda yang memiliki nilai kepentingan

¹⁴ Borja Martinovic, Karen Freihorst, dan Magdalena Bobowik, "To Apologize or to Compensate for Colonial Injustices? The Role of Representations of the Colonial Past, Group-Based Guilt, and In-Group Identification," dalam *International Review of Social Psychology*, 34(1): 20, 1–14, 2021, DOI: 10.5334/irsp.484

¹⁵ Hakim Khalid Mehraj, Akhtar Neyaz Bhat, dan Hakeem Rameez Mehraj, "Impacts OF Media on Society: A Sociological Perspective," dalam *International Journal of Humanities and Social Science Invention Volume 3 Issue 6*, 2014, ISSN: 2319 – 7722

relatif dari keprihatinan yang diangkat untuk mempengaruhi pandangan khalayak teori agenda *setting* digunakan. Menurut hipotesis ini, masyarakat umum akan mulai berpikir bahwa suatu berita penting jika diliput oleh media secara sering dan mencolok.¹⁶

Jepang merupakan salah satu negara yang melakukan praktik kolonialisme terutama peran yang dilakukan pada masa Perang Dunia Kedua. Transisi dari negara yang lemah, feodal, dan agraris ke negara industri modern, yang mampu melawan hegemoni asing secara ekonomi dan militer, Jepang bangkit sebagai kekuatan kolonial pada tahun 1890-an. Dalam mencapai kepentingan strategis langsung Jepang menduduki wilayah di dekat pulau asalnya demi memanfaatkan kekuatan politik, militer, dan ekonomi untuk membangun sebuah otoritas imperium yang bertanggung jawab di pemerintah pusat dengan menggunakan kekerasan. Kemudian, pada paruh kedua abad kesembilan belas, tujuan kekaisaran Jepang bertumbuh yang termasuk keinginan idealis untuk "mengangkat" tetangga Asia yang masih terbelakang.¹⁷

Setelah Jepang mengakui kekalahannya pada Perang Dunia Kedua kepada kubu sekutu, Indonesia dan Korea Selatan sebagai dua contoh negara bekas jajahan pada tahun 1945 memproklamasikan kemerdekaannya. Persamaan historis kedua antara negara ini adalah konflik internal setelah kemerdekaan dimana perpecahan Korea menjadi Korea Utara dan Korea Selatan akibat perang saudara, lalu pemberontakan lokal dan gerakan separatis di Indonesia yang pada tahun 1960-an kedua negara berhasil mengkonsolidasikan pusat kekuasaan dan mengatasi konflik internal ini. Kedua negara mengadopsi demokrasi setelah beberapa dekade berada dibawah pemerintahan rezim militer dan kediktatoran yang didukung oleh kekuatan militer memerintah kembali seperti sejak awal pembentukan negara. Kedua negara sama-sama memiliki

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Peter Duus, "The Japanese Colonial Empire, 1895-1945," dalam *The Cambridge History of Japan*, 215–270, 1989, DOI: 10.1017/CHOL9780521223577.006

kebijakan anti-komunisme dimana Indonesia telah melarang ideologi komunisme pada tahun 1965 setelah terjadinya pemberontakan dan Korea Selatan yang melarang komunisme setelah terpecahnya Korea pada tahun 1948.¹⁸

Terakhir dalam sektor ekonomi, dilakukannya intervensi kebijakan ekonomi dan kebijakan industri pemerintah yang terarah untuk mendukung sektor industri tertentu oleh Korea Selatan dan Indonesia. Dalam mengelola perekonomian, kedua negara juga mendukung praktik konglomerasi dengan Samsung Group dari Korea Selatan dan Salim Group dari Indonesia. Indonesia dan Korea Selatan setelah memperoleh kemerdekaan, kedua negara berasal dari tingkat perkembangan yang sama akibat dari runtuhnya Perang Dunia Kedua dan perang kemerdekaan yaitu negara miskin yang baru memulai. Maka dari itu Indonesia dan Korea Selatan sama-sama mengundang IMF (*International Monetary Fund*) untuk menyelamatkan ekonomi mereka dari kebangkrutan ketika terkena krisis Keuangan Asia 1997.¹⁹

Ditambah dengan permasalahan *comfort women* yang dimana pemerintah Jepang tidak pernah memberikan permintaan maaf baik kepada korban di Indonesia maupun di Korea Selatan sampai sekarang yang mengakibatkan isu ini tidak terselesaikan. Pemerintah Jepang memimpin penganiayaan sekunder terhadap para korban *comfort women* dengan mengabaikan tanggung jawab yang lebih penting, seperti mendidik kaum muda atau mengambil tindakan untuk mencegah kerugian sekunder bagi para korban.²⁰ Bagi para korban dari Korea Selatan permintaan maaf yang tulus dari pemerintah Jepang merupakan hal yang diinginkan untuk

¹⁸ Irwanda Wisnu Wardhana, "Political Economic Determinants of Growth Acceleration: A Korea-Indonesia Comparative Study," dalam *Kajian Ekonomi Keuangan Vol 20 No. 1*, 2016

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Yuji Hosaka, "Why Did the 2015 Japan-Korea 'Comfort Women' Agreement Fall Apart?" 2021, <https://thediplomat.com/2021/11/why-did-the-2015-japan-korea-comfort-women-agreement-fall-apart/>

menyelesaikan permasalahan ini.²¹ Dan bagi korban yang berasal dari Indonesia, selain permintaan maaf yang tulus dari pemerintah Jepang secara pribadi mereka juga ingin agar sekolah di Jepang memasukkan topik jufu kwanfu kedalam pembelajarannya agar pengalamannya dan penyintas lainnya tidak terlupakan.²² Tidak ada permintaan maaf tulus yang diberikan oleh pemerintah Jepang sampai akhir hayat aktivis dan korban *comfort women* menjadi salah satu permasalahan yang mempengaruhi hubungan Jepang dengan negara yang dulu dijajah.

Dengan penjelasan diatas, maka penulis ingin meneliti bagaimana media mempengaruhi sikap Indonesia dan Korea Selatan terhadap Jepang pasca penjajahan. Pengertian sikap adalah perbuatan dan sebagainya yang berdasarkan pada pendirian, keyakinan Kata sikap berada di kelas intelegensi yang sama dengan ide: buah pikiran, cita-cita, pandangan, pendapat, pendirian, rancangan, tanggapan Maka dari itu, sikap yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ide: buah pikiran, pandangan, pendapat, serta tanggapan yang berdasarkan pada pendirian dan keyakinan.

1.2 Identifikasi Masalah

Kejahatan dan kekerasan yang dilakukan oleh tentara Jepang pada masa kolonialnya menimbulkan luka mendalam bagi masyarakat negara terjajah seperti Indonesia dan Korea Selatan, terlebih pada saat ini masih terdapat generasi sebelumnya yang sempat merasakan dan mengingat kenangan selama masa penjajahan. Walaupun Indonesia dan Korea Selatan sempat berada dibawah penjajahan dan memiliki hari kemerdekaan dari Jepang yang berdekatan, kedua

²¹ Lauren Frayer, "Not All South Koreans Satisfied With Japan's Apology To 'Comfort Women,'" 2017, <https://www.npr.org/sections/parallels/2017/05/30/529671510/not-all-south-koreans-satisfied-with-japans-apology-to-comfort-women>

²² Katharine McGregor, 'Emotions and activism for former so-called "comfort women" of the Japanese Occupation of the Netherlands East Indies,' 2016, DOI: 10.1016/j.wsif.2015.11.002

negara memiliki impresi yang sangat jauh berbeda kepada pemerintahan Jepang saat ini. Survei opini Korea Selatan terhadap Jepang mengatakan bahwa sebanyak 52,8 persen orang memiliki kesan yang negatif, ada sebanyak 52 persen orang yang memiliki pemikiran bahwa relasi antara Korea Selatan dan Jepang tidak akan meningkat, dan hanya terdapat 6,6 persen orang Korea Selatan yang memiliki kesan positif mengenai Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida.²³ Sebaliknya, berbeda dengan Korea Selatan, masyarakat Indonesia memiliki impresi yang bertolak belakang dengan sebanyak 83 persen masyarakat muda Indonesia yang memiliki kesan positif terhadap Jepang, menganggap tidak relevan untuk melakukan gugatan permintaan maaf dan ganti rugi dengan asumsi bahwa sejarah telah terjadi sejak lama, dan mayoritas melihat bahwa hubungan antara Indonesia dan Jepang dalam keadaan yang baik.²⁴

Fenomena ini menarik perhatian penulis mengingat Jepang sebagai negara penjajah tidak pernah memberikan permintaan maaf resmi secara langsung dan spesifik kepada negara-negara yang dulu terjajah, atas kekerasan yang dilakukan pada masa kolonialismenya Jepang hanya meminta maaf atas apa yang terjadi saat Perang Dunia Kedua. Ditambah dengan pernyataan yang diberikan oleh mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe tahun 2015 dengan menggunakan kata yang mereplikasi bahasa kunci dari Pernyataan Murayama 1995 dan Pernyataan Koizumi 2005. Pernyataan yang diberikan Shinzo Abe dengan menggunakan kata-kata yang terkesan seperti pengakuan diam-diam bahwa Jepang sebenarnya bersalah atas kejahatan perang sejak awal namun tidak dalam konteks yang diharapkan terutama dengan justifikasi yang diberikan untuk Jepang melakukan agresi dan membentuk pemerintahan kolonial pada masa itu.²⁵

²³ “Japanese and South Koreans see each other more favorably, poll shows,” The Japan Times, 2022, <https://www.japantimes.co.jp/news/2022/09/02/national/south-korea-japan-relations-survey/>

²⁴ Sidik Jatmika, “The Indonesian Youth Perception Towards Japan,” 2018, <https://www.tsukuba-g.ac.jp/library/kiyou/2018/04D.R.%20Sidik%20Jatmika,%20M.Si.pdf>

²⁵ Shannon Teizzi, “The Abe Statement: Did Abe Apologize?” The Diplomat, 2015, <https://thediplomat.com/2015/08/the-abe-statement-did-abe-apologize/>

Sikap Pemerintah Jepang yang menolak untuk mengakui kesalahan dan kejahatan perangnya mengorek luka lama bagi negara yang dulu terjajah. Contoh pertama adalah kunjungan ke Kuil Yasukuni untuk menghormati pelaku perang agresi Jepang yang membawa penderitaan bagi jutaan orang di seluruh Asia sebagai pahlawan oleh Perdana Menteri Jepang dan beberapa anggota kabinet. Kedua adalah upaya penggambaran perang agresi Jepang sebagai "pembebasan" negara-negara terbelakang demi membingkai ulang pembunuhan brutal sebagai "perang suci bela diri" secara terang-terangan melalui penulisan ulang buku teks sejarah oleh anggota sayap kanan. Sikap-sikap tidak pernah melakukan introspeksi atau perenungan yang tulus terhadap sejarah perang dan penderitaan masa penjajahan seperti ini dari Pemerintah Jepang menimbulkan perasaan jika Jepang tidak benar-benar menyesali perbuatannya.²⁶ Maka dari itu, adanya perbedaan opini antara kedua negara yang dulu terjajah kepada Jepang walau memiliki persamaan secara historis dan politik patut dianalisis untuk melihat bagaimana peran media dalam membawa pengaruh terhadap pandangan masyarakat sebuah negara terhadap negara yang lain.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan deskripsi yang ada diatas, pembahasan topik penelitian akan dibatasi pada portal berita The Jakarta Post dari Indonesia dan The Hankyoreh dari Korea Selatan dalam membuat *framing* terkait memberitakan hubungan negaranya dengan Jepang sebagai media yang aktif dalam menyiarkan pemberitaan. Rentang waktu yang akan menjadi fokus dalam penelitian

²⁶ Luo Linqun, "Japan's leaders are still stubbornly refusing to admit their war crimes," 2014, <https://www.irishtimes.com/news/world/asia-pacific/japan-s-leaders-are-still-stubbornly-refusing-to-admit-their-war-crimes-1.1665858>

ini adalah bulan September tahun 2020 yang dimana pada bulan ini Jepang mengangkat Perdana Menteri yang baru dengan melantik Suga Yoshihide.²⁷ Suga Yoshihide dilantik sebagai penerus Shinzo Abe yang terkenal sebagai tokoh yang giat berusaha menghidupkan kembali kekuatan bersenjata negara dan menutupi kebrutalan masa lalu imperialisme Jepang sebagai seorang militeris sayap kanan.²⁸ Pembatasan masalah dalam topik ini akan diakhiri pada bulan Desember 2020 untuk melihat bagaimana portal berita dari Indonesia dan Korea Selatan memberitakan berita berkaitan dengan Jepang dalam 100 hari pertama Suga Yoshihide melakukan tugasnya sebagai Perdana Menteri sebelum akhirnya memutuskan untuk memundurkan diri dari jabatannya setahun kemudian.²⁹ Penulis membatasi penelitian pada rentang waktu ini selain karena periode yang paling terbaru yang dapat digunakan dalam menganalisis, singkatnya masa jabatan Suga Yoshihide membantu penulis dalam melihat bagaimana sikap Indonesia dan Korea Selatan kepada Jepang dibawah kedudukan Perdana Menteri yang sama.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fakta-fakta dan pembatasan masalah yang sudah ditetapkan, maka gambaran mengenai permasalahan yang akan dibahas telah tergambar dengan jelas. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana media mempengaruhi perspektif masyarakat Indonesia dan Korea Selatan terkait hubungan negaranya dengan Jepang?”**

²⁷ “Profile of the Prime Minister,” Prime Minister of Japan and His Cabinet, [japan.kantei.go.jp](https://japan.kantei.go.jp/99_suga/meibo/daijin/suga_e.html), diakses pada 27 September 2022, https://japan.kantei.go.jp/99_suga/meibo/daijin/suga_e.html

²⁸ C. J. Atkins, “Shinzo Abe, Japan’s right-wing militarist former prime minister, assassinated,” 2022, <https://www.peoplesworld.org/article/shinzo-abe-japans-right-wing-militarist-former-prime-minister-assassinated/>

²⁹ Motoko Rich, “Japan’s Prime Minister Will Step Aside After Just a Year in Office,” 2021, <https://www.nytimes.com/2021/09/02/world/asia/japan-suga-resign-election.html>

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan pertama sebagai tugas akhir yang menjadi salah satu syarat kelulusan Strata 1 (S1) Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan. Kemudian, sebagai tujuan kedua, penelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait peran media dalam membawa pengaruh terhadap opini Indonesia dan Korea Selatan terhadap Jepang pasca penjajahan. Tujuan kedua ini ditujukan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai fenomena yang terjadi dalam hubungan internasional dan yang dalam penelitian ini menyangkut media, *media framing*, dan hubungan Indonesia-Korea Selatan terhadap Jepang. Tujuan ketiga dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengembangkan teori dan konsep yang ada dalam studi Hubungan Internasional dan mengimplementasikannya kedalam studi kasus fenomena internasional. Untuk itu, penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan-tujuan yang sudah ada diatas.

1.6 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan kegunaan pertama adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait peran media dalam membawa pengaruh pada sikap Indonesia dan Korea Selatan terhadap Jepang pasca penjajahan. Kegunaan kedua penelitian ini adalah sebagai bahan referensi bagi para pembaca mengenai media dalam berperan dan membawa pengaruh dengan menggunakan *media framing* dalam hubungan antar negara. Kegunaan ketiga dari penelitian ini adalah untuk menyediakan pengetahuan mengenai studi Hubungan Internasional dan bagaimana pengimplementasiannya dalam menilai dan menjelaskan fenomena internasional. Sebagai bahan

referensi dan penyedia pengetahuan, penulis berharap bahwa informasi dan pandangan yang ada dalam penelitian ini dapat berguna untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang terjadi dalam hubungan internasional. Kegunaan terakhir adalah dengan menggunakan studi kasus sebuah fenomena internasional, fenomena ini berguna untuk mengembangkan teori dan konsep Hubungan Internasional.

1.7 Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini sebagai pedoman penelitian penulis akan mencantumkan empat karya tulis keilmuan dengan tulisan ilmiah pertama adalah jurnal akademik dengan judul “*Online Perspectives on ASEAN-Japan Relations: An Analysis of ASEAN-related Japanese Tweets*” yang diterbitkan pada tahun 2018 yang ditulis oleh Indah S. Pratidina. Dalam tulisannya Indah S. Pratidina mengatakan bahwa analisis pembicaraan terkait ASEAN di Twitter dapat mengambil manfaat besar dari pemahaman hubungan *online* antara ASEAN dan Jepang serta iklim politik di platform *online* Jepang dengan kemungkinan besar sejarah panjang keterlibatan pemerintah Jepang dengan ASEAN akan mempengaruhi pendapat individu Jepang tentang ASEAN. Diplomasi keamanan politik dan ekonomi, serta integrasi dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, seringkali diusung oleh aktor-aktor negara yang memiliki nilai berita tinggi dengan menggunakan instrumen media sebagai arus utama dimana sumber media akan mencakup subjek yang mirip satu sama lain sehingga akan mempengaruhi isi media sosial. Dalam penelitiannya, Indah menemukan adanya tweet dengan kecenderungan nasionalisme Jepang yang kuat dimana media juga berfokus pada politik identitas nasional sehingga adanya politik nasionalis menarik generasi muda bangsa ini dalam kaitannya dengan persoalan sejarah

selain peningkatan intra-perdagangan, pertukaran budaya, dan kegiatan lainnya. Berdasarkan tweet yang tersedia, adanya kekhawatiran tentang ambisi nasional mendorong warga Jepang untuk mengungkapkan kekhawatiran mereka tentang potensi kehilangan pengaruh ekonomi dan politik negara mereka di negara-negara Asia Tenggara dan mendukung partisipasi aktif di wilayah tersebut karena kepercayaan bahwa faktor tersebut akan berdampak pada kepentingan regional.³⁰

Tulisan ilmiah kedua adalah artikel akademik dengan judul “*Media Coverage and the Association between Japanese Perceptions of South Korea and North Korea*” yang diterbitkan pada tahun 2018 yang ditulis oleh Takeshi Iida, dimana dalam tulisannya Iida mendapati bahwa dalam media Jepang Korea Selatan lebih sering dikaitkan dengan Korea Utara di media daripada Tiongkok yang ditunjukkan dengan banyaknya persentase dimana Korea Selatan muncul dalam cerita tentang Korea Utara lebih sering daripada Tiongkok. Kemudian penggiringan opini terhadap Tiongkok untuk dihubungkan dengan sikap terhadap Korea Selatan dan Korea Utara dimana warga Jepang kemungkinan akan melihat Tiongkok melalui perspektif yang sama seperti yang mereka lakukan terhadap Korea Selatan dan Utara karena Tiongkok yang bergabung dengan Korea Selatan dan Korea Utara dalam menyalahkan Jepang atas masalah sejarah. Masyarakat Jepang yang pada gilirannya terpicu konflik akibat banyaknya media yang melaporkan hal-hal yang menjadi pemicu kebencian dengan masyarakat Korea seperti terciptanya hari peringatan untuk Pulau Takeshima (Dokdo) yang kontroversial oleh Majelis Prefektur Shimane dan perjalanan perdana menteri Jepang ke Kuil Yasukuni menjadi alasan mengapa keduanya rentan akan gesekan. Tingkat pengangguran yang tinggi dan persetujuan

³⁰ Indah S. Pratidina, “Online Perspectives on ASEAN-Japan Relations: An Analysis of ASEAN-related Japanese Tweets” dalam *The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies Vol. 2, No.1*, pp. 67-89, 2018, DOI: 10.22146/ikat.v2i1.37393

kabinet yang rendah diperkirakan akan berdampak negatif pada sikap Jepang terhadap Korea Selatan dan Utara mengingat bahwa pemerintah biasanya mencoba untuk mengalihkan perhatian publik dari ekonomi menurun atau peringkat persetujuan yang rendah dengan mempromosikan permusuhan terhadap negara-negara asing. Iida berargumen bahwa media memiliki dampak besar pada banyak orang bahkan dengan kelompok dari negara berbeda sehingga dapat mempengaruhi bagaimana publik memandang hubungan antara dua negara yang ditunjukkan lewat kasus ketika dua negara disebutkan di media lebih sering maka kesan masyarakat tentang negara-negara tersebut akan menjadi lebih kuat terkait.³¹

Tulisan ilmiah ketiga adalah artikel akademik dengan judul “*The Logic of New Media in International Affairs*” yang diterbitkan pada tahun 2002 yang ditulis oleh Alan R. Kluver, dimana dalam tulisannya Kluver berpendapat bahwa dalam menyampaikan informasi politik akan diperbaiki khususnya karena cara teknologi informasi baru akan meningkatkan demokrasi dengan berkurangnya media konvensional pada era media baru. Media jarang membantu pembaca memahami budaya, kepercayaan, dan sentimen dari kehidupan tersebut di negara yang terpengaruh karena hanya berfokus pada fokus pada berita terkini yang penting pada saat itu dengan penggambaran yang dramatis membuat masyarakat menganggapnya sebagai semacam basis data untuk fakta penting tentang kejadian internasional dibandingkan sebagai sebuah narasi. Kluver berpendapat bahwa nuansa sebuah berita akan dipilih dan ditampilkan tergantung pada struktur narasinya berdasarkan keakuratan materi yang ditawarkan sehingga informasi yang ada akan menjadi sangat berharga ketika diproses dan disaring dengan benar akibat sulitnya untuk mengidentifikasi perbedaan antara kebohongan dan informasi yang membantu membuat

³¹ Takeshi Iida, “Media Coverage and the Association between Japanese Perceptions of South Korea and North Korea,” 2018, DOI:10.15545/2018005

pembaca bergantung pada logika fakta yang ada untuk menyampaikan informasi yang diperlukan. Oleh karena itu, dalam bagaimana sebuah informasi disajikan media memiliki kendali atas otoritas dan pengaruh untuk memutuskan bagaimana informasi harus diatur atas kebutuhan tata letak data untuk secara efektif menyampaikan cerita dalam hal ini yang melintasi batas-batas bahasa, budaya, dan politik serta membatasi kemampuan kita untuk memahami hal-hal yang rumit dan memecah belah. Saat ini, media mencerminkan persepsi dan keyakinan pengguna utamanya melihat pengaruh politik yang signifikan terhadap individu yang terlibat atas logika basis data media baru yang dimiliki karena dibatasinya potensi media untuk membangun "narasi hebat".³²

Tulisan ilmiah keempat adalah artikel jurnal dengan judul "*Can the Media Create Public Opinion?: A Social-Identity Approach*" dalam jurnal *Current Directions in Psychological Science* yang diterbitkan pada tahun 1999 yang ditulis oleh Phyllis A. Anastasio, Karen C. Rose dan Judith Chapman. Jurnal ini berargumen bahwa anggota dari kedua belah pihak sering menganggap media bertentangan dengan kelompoknya sendiri sebagai akibat dari liputan media yang netral tentang situasi yang kontroversial karena persepsi dan opini dapat secara efektif dipahat oleh identitas sosial sehingga berita tersebut dipandang sebagai bias dan agresif. Anggota ingroup memiliki kekuatan persuasif sehingga sering mempengaruhi pendapat anggota lainnya, maka dari itu agar memudahkan individu untuk mencerna informasi faktual dengan cara yang bias dengan menekankan perbedaan antarkelompok media menggambarkan perspektif dunia yang tidak representatif dan yang membiaskan pandangan orang. Keterlibatan media yang secara konsisten melaporkan opini daripada bagaimana perasaan populasi yang lebih luas tentang subjek tertentu dapat mengurangi keinginan untuk berpikir kritis dan memperburuk disposisi

³² Alan R. Kluver, "The Logic of New Media in International Affairs," 2002, DOI: 10.1177/146144402321466787

yang kuat untuk mendukung *in-group* yang jika dipaparkan dengan sudut pandang kelompok yang beragam kecenderungan ini akan berkurang. Untuk mengurangi perbedaan kelompok dan membuat hubungan yang diperlukan berita yang melintasi perbedaan antar kelompok karena media memiliki kemampuan untuk membangun dan menghancurkan jembatan karena menyebarkan informasi dan menetapkan norma-norma sosial dengan memproses pesan yang lebih penting daripada eksternal dan paparan sudut pandang lain dapat memotong manfaat heuristik yang sering ditawarkan oleh anggota ingroup.³³

Keempat kajian literatur diatas memiliki kesamaan yaitu menjelaskan bagaimana peran media dapat mempengaruhi opini dalam masyarakat. Kajian literatur pertama menjelaskan bagaimana media berperan dalam menyebarkan paham nasionalisme dan politik identitas nasional; kajian literatur kedua menjelaskan bagaimana media berperan dalam menggiring pandangan terhadap negara lain; kajian literatur ketiga menjelaskan bagaimana media berperan dalam mempresentasikan narasi sebuah fenomena kepada pembaca; dan kajian literatur keempat menjelaskan bagaimana media berperan dalam menyebarkan pesan dan menetapkan norma dari informasi yang diterbitkan. Perdebatan argumentasi utama dari keempat kajian literatur diatas adalah pendapat bahwa media hanya berperan sebagai instrumen oleh kajian literatur pertama dan kedua, sedangkan kajian literatur ketiga dan keempat berpendapat bahwa media adalah aktor yang memiliki kuasa penuh. Berdasarkan keempat kajian literatur diatas, penulis sependirian dengan pendapat dari kajian literatur ketiga dan keempat yang melihat bahwa media sebagai aktor dalam perannya mempengaruhi opini masyarakat yang memiliki kuasa utuh.

³³ Phyllis A. Anastasio, Karen C. Rose dan Judith Chapman, "Can the Media Create Public Opinion?: A Social-Identity Approach" dalam *Current Directions in Psychological Science* 8(5), 152–155, 1999, DOI:10.1111/1467-8721.00036

1.8 Kerangka Teori

Dalam melakukan penelitian kali ini, penulis akan menggunakan konstruktivisme yang melihat bahwa ide atau norma itu penting sehingga dapat mempengaruhi hubungan internasional, untuk itu konstruktivisme telah menunjukkan bagaimana budaya dan identitas berperan dalam menentukan tujuan dan membentuk aktor.³⁴ Konstruktivisme memandang bahwa sistem sosial antar-subjektif membentuk identitas dan tujuan aktor yang secara intrinsik merupakan makhluk sosial bersamaan dengan menolak klaim bahwa aktor sosial menentukan kepentingannya sebelum terlibat dalam interaksi sosial dan yang terlibat dalam hubungan interpersonal hanya untuk alasan taktis karena sifat dasarnya yang egois atomistik. Tiga klaim ontologis utama tentang keberadaan sosial adalah fokus konstruktivisme yang menurutnya lebih menjelaskan politik global daripada anggapan rasionalis yang bersaing yaitu pertama, konstruktivis percaya bahwa struktur normatif atau ideasional sama pentingnya dengan struktur material sejauh struktur dapat diklaim mempengaruhi perilaku aktor sosial dan politik, apakah mereka orang atau pemerintah karena ide, keyakinan, dan nilai bersama juga memiliki karakteristik struktural dan memiliki dampak signifikan pada tindakan sosial dan politik. Kedua, karena identitas mempengaruhi kepentingan yang pada gilirannya mempengaruhi tindakan konstruktivis berpendapat bahwa sangat penting untuk memahami bagaimana struktur non-material mempengaruhi identitas sosial orang atau negara untuk menjelaskan penciptaan minat aktor. Ketiga, perilaku yang diinformasikan dari aktor tersebut dapat mengkondisikan identitas dan kepentingan aktor dimana agen dan struktur dikatakan saling karena menekankan pengaruh

³⁴ Robert Jackson dan Georg Sørensen, *Introduction to International Relations Theories and Approaches*, 5th. ed. (Oxford: Oxford University Press, 2013), 248-254

struktur non-material pada identitas dan kepentingan, serta peran penting yang dimainkan oleh praktik dalam menegakkan dan mengubah struktur tersebut maka konstruktivisme lebih tepat dikategorikan sebagai strukturasionisme. Untuk menentukan makna dan identitas aktor individu dan pola aktivitas ekonomi, politik, dan budaya yang sesuai yang dilakukan oleh individu tersebut konstruktivisme melembagakan norma dan ide untuk menciptakan dan menginstansiasi struktur sosial yang relatif stabil dalam artian kita mendefinisikan identitas dan minat melalui interaksi timbal balik.³⁵

Dalam studi Hubungan Internasional terdapat banyak teori yang dapat dipakai untuk melakukan analisis terhadap fenomena internasional yang terjadi dan untuk melakukan penelitian kali ini penulis akan menggunakan *social power theory*. Guna menjelaskan perubahan yang terjadi dalam rangkaian interaksi untuk mempengaruhi dan memulai perubahan sebagai interpretasi penjelas dalam mengkoordinasikan transisi perilaku menggunakan konsep kekuatan, maka dari itu teori kekuatan sosial digunakan. Perubahan sikap, kepemimpinan, perilaku yang harmonis dapat dicakup dalam konsep kekuatan yang berperan sebagai karakteristik hubungan sosial dimana jumlah kekuasaan ditentukan oleh peristiwa yang terjadi dalam hubungan tersebut. Kapasitas setiap aktor dapat digunakan untuk mempengaruhi perubahan, maka dari itu ketidaksetaraan kekuatan dapat cepat muncul melalui interaksi dalam kelompok dimana setiap orang memulai di titik yang sama.³⁶

Teori ini melihat bahwa kita semua saling mempengaruhi dan pada gilirannya dipengaruhi oleh orang lain, tidak ada yang bisa menghindari interaksi kekuatan karena kekuatan dapat ditemukan di dalam hubungan sosial. Kekuatan bersifat cair, non-linier, bergerak melalui

³⁵ *Ibid*, 207-208

³⁶ John Schopler, "Social Power," dalam *Advances in Experimental Social Psychology Volume 2*, 177–218, 1965, DOI:10.1016/S0065-2601(08)60106-9

koneksi dan komunikasi tanpa mempertimbangkan bagaimana hal tersebut digunakan dan dianggap oleh aktor lainnya dimana sumber daya dan kemampuan objektif jarang dihargai. Dalam interaksi sosial, institusi, wacana, dan media digunakan dalam studi mengenai kekuatan dengan memberikan konsepsi alternatif yang diperlukan tentang kekuatan dimana penggunaan kekuasaan selalu terjadi dalam lingkungan sosial tertentu. Institusi, hubungan, komunikasi, dan interaksi semuanya berperan dalam kekuatan sosial yang menjadi sasaran dan subjek yang dihadapi, dapat mempengaruhi seberapa baik potensi kekuasaan digunakan. Pandangan bahwa interaksi di bidang politik, ekonomi, dan sosial dihasilkan dari pengetahuan sosial, komunikasi, dan kekuasaan bersifat spesifik secara situasional karena digunakan dalam hubungan timbal balik yang hanya berfungsi dalam hubungan, maka dari itu kekuatan sosial pada akhirnya bergantung pada bagaimana impresi aktor lain.³⁷

Agenda setting, framing, diplomasi publik, dan nation branding merupakan aspek kekuatan sosial dimana kooptasi kekuatan sosial sering digunakan untuk mempromosikan tujuan kebijakan tanpa merugikan kepentingan orang lain. Mempengaruhi orang lain tanpa menggunakan kekerasan maka kapasitas untuk menarik yang dihasilkan dari budaya, cita-cita politik, dan kebijakannya dilihat sebagai keuntungan yang besar. Menggunakan *soft power*, kebijakan luar negeri suatu negara akan menghadapi lebih sedikit oposisi terhadap kepentingannya jika dapat membuat kekuatannya valid dalam perspektif orang lain sebagai fasilitator psikologis dalam politik internasional. Kemampuan untuk menciptakan standar dan dasar dalam menetapkan norma dan nilai yang dipandang dapat diterima dan diinginkan melampaui daya tarik dan persuasi dalam aktivitas aktor menjadikannya pondasi dari kekuatan

³⁷ Peter van Ham, *Social Power in International Politics*, (Oxon: Routledge, 2010), 3-4

sosial. Maka dari itu, kekuatan sosial akan bersumber pada efek *framing*, advokasi norma, *agenda setting*, pengaruh media, komunikasi, *nation branding*, dan diplomasi publik.³⁸

Teori ini melihat bahwa media, mode, tren, tradisi, budaya, dan institusi, semuanya memiliki peran besar dalam membentuk kekuatan sosial yang dapat memberikan dampak signifikan pada preferensi dan pandangan dunia. Untuk itu sangat penting peran dari aktor yang memiliki pandangan kuat tentang perilaku yang pantas atau dapat diterima dalam kelompok menggunakan kekuatan sosial dan advokasi norma. Media sebagai salah satu dari aktor dalam memainkan peran sebagai perantara atau penggerak sering kali menciptakan koalisi wacana dengan maksud membentuk atau menantang aturan permainan politik global dalam pemerintahan global.³⁹

Dimulai dengan upaya persuasif melalui pembingkaihan kognitif dan berakhir ketika massa kritis terbentuk yang menghasilkan titik kritis, tiga tahap norma ini menjelaskan metode dimana norma diterima sebagai perilaku aktor yang tepat. Dalam kekuatan sosial, istilah seperti pembingkaihan, penggambaran, skenario, dan pandangan digunakan untuk menggambarkan proses pembuatan makna sosial yang memberikan kerangka mental ketika membentuk cara memandang dunia. Berfokus pada media, institusi, dan proses persebaran kekuatan dalam mengeksplorasi hubungan sosial ketika menentukan aktor, kapasitas, serta praktik apa yang dimungkinkan untuk dilakukan secara sosial selain tindakan dan interaksi para aktor merupakan argumen dari teori ini.⁴⁰ Teori ini penulis gunakan dalam menganalisis alasan mengapa media sebagai aktor dalam Hubungan Internasional dapat mempengaruhi perspektif masyarakat dengan berdasarkan pada konsep yang digunakan juga dalam penelitian ini.

³⁸ *Ibid*, 4-8

³⁹ *Ibid*.

⁴⁰ *Ibid*, 10-22

Dalam studi Hubungan Internasional terdapat banyak konsep yang dapat dipakai untuk melakukan analisis terhadap fenomena internasional yang terjadi dan untuk melakukan penelitian kali ini penulis akan menggunakan konsep nasionalisme. Menggunakan nasionalisme ke ranah politik domestik menjadi fenomena di dalam negara bangsa dan Hubungan Internasional sebagai bentuk dari mempertahankan identitas dan otonomi intelektualnya, karena adanya persamaan identitas hal tersebut dapat mempersatukan suatu kelompok.⁴¹ Kebangsaan dan nasionalisme bukan lagi istilah yang cocok untuk mendefinisikan dan menganalisis formasi politik atau bahkan sikap dengan adanya perkembangan jumlah organisasi internasional dan non-pemerintah, pasar ekonomi, keuangan internasional, transportasi, komunikasi, dan teknologi. Hanya peninggalan budaya yang dihasilkan oleh masyarakat dalam jangka waktu tertentu yang dapat dianggap sebagai bangsa dan nasionalisme untuk memotivasi rakyat dalam berpartisipasi aktif dalam urusan sipil.⁴²

Kemampuan suatu bangsa untuk bertahan hidup sangat bergantung pada kemajuan teknologi komunikasi dimana negara adalah kumpulan orang yang terikat oleh pengetahuan budaya yang ditransfer melalui jaringan komunikasi, maka pembentukan negara disertai juga dengan peningkatan dalam komunikasi. Jejaring sosial dan media *online* memberi masyarakat lebih banyak kebebasan untuk berinteraksi dan berpartisipasi dalam politik serta urusan publik sehingga mereka memiliki kebebasan untuk memilih komunitas berdasarkan minat dan nilai masing-masing. Kecenderungan ketika negara tidak membutuhkan mekanisme pemerintahan yang demokratis dan kebijakan politik sosial budaya yang menjamin kesejahteraan, kesetiaan, dan ketaatan dalam aktivitas rakyat sudah cukup menentukan nasionalisme saat ini. Hal ini

⁴¹ Martin Grinths dan Michael Sullivan, "Nationalism and International Relations Theory," 1997, DOI: 10.1111/j.1467-8497.1997.tb01378.x

⁴² Nortautas Statkus, "The Role of Nationalism in the 21st Century System of International Relations," 2019, DOI: 10.2478/lasr-2019-0005

membuka jalan bagi pembentukan negara-bangsa, atau kelompok-kelompok yang saling berhubungan secara politik dan budaya sesuai dengan proyeksi terbuka dengan pertumbuhan kapitalisme dan industri.⁴³ Konsep ini penulis gunakan untuk menganalisis faktor pembeda dari perspektif antara Indonesia dan Korea Selatan terhadap Jepang pasca penjajahan.

Dalam melakukan analisis terhadap fenomena internasional yang terjadi dan untuk melakukan penelitian juga penulis akan menggunakan konsep *framing*. *Framing* sendiri memiliki definisi sebagai aturan pemilihan, penekanan, dan penyajian sebagai rangka atau pemahaman yang terorganisir mencakup gaya naratif tentang bagaimana gagasan terkait opsi tertentu untuk memberi makna pada rangkaian peristiwa yang berkembang dan kaitannya. Istilah "*frame*" dan "*framing*" digunakan dalam cara berbeda untuk merujuk pada kata-kata, gambar, frasa, dan teknik presentasi yang digunakan pembicara saat berkomunikasi dengan orang lain. *Frame of mind* merujuk pada perspektif seseorang pada keadaan tertentu dalam penekanan atau arti penting menggunakan kerangka komunikasi dan kerangka berpikir. Maka dari itu, efek pemingkiaan, yang menggambarkan bagaimana pemingkiaan dalam komunikasi sering membentuk kerangka dalam pikiran.⁴⁴

Penggunaan berbagai istilah atau frasa secara konseptual mungkin mendorong orang untuk mengubah pilihan mereka sehingga ketika *frame* menampilkan informasi yang sama dalam cahaya baik atau negatif menyebabkan pemilihan preferensi yang berbeda berdasarkan penilaian atau tindakan tertentu. Menyoroti bagian yang berpotensi penting, seorang pembicara dapat mempengaruhi pendengar untuk berkonsentrasi pada elemen atau karakteristik tertentu dari suatu fenomena. Hal ini dapat dilakukan oleh pembicara sembari merumuskan penilaian mereka

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ James N. Druckman, "The Implications of Framing Effects for Citizen Competence," 2001, DOI:10.1023/a:1015006907312

menggunakan rangka dalam komunikasi untuk menekankan efek pembingkai malah berpusat pada banyak masalah yang berpotensi penting.⁴⁵

Dalam Hubungan Internasional, media berperan besar dalam melakukan *framing* atau membantu upaya orang lain untuk membingkai atau menyangkal peristiwa kebijakan luar negeri baik secara sengaja atau tidak sengaja. Maka dari itu, reaksi masyarakat bergantung pada bagaimana media bereaksi sehingga untuk melihat audiens yang dituju, orang yang memulai *frame*, maupun mereka yang menjadi fokus dari efek *framing*. Dalam menganalisis fenomena dalam hubungan internasional karena tergantung pada topik yang dibahas serta siapa yang membingkai dan/atau siapa yang dibingkai maka metode dan taktik yang digunakan juga akan berbeda.⁴⁶ Konsep ini penulis gunakan untuk menganalisis bagaimana media mempengaruhi perspektif Indonesia dan Korea Selatan terhadap Jepang pasca penjajahan. Dengan penjelasan yang ada diatas penulis akan menggunakannya paradigma konstruktivisme dalam menjelaskan bagaimana ide, norma, dan identitas membentuk konstruksi sosial; *social power theory* digunakan untuk menjelaskan bagaimana ide, norma, dan identitas berperan dalam melaksanakan konstruksi sosial tersebut; serta konsep nasionalisme dan *framing* dalam menjelaskan perbedaan sikap Indonesia dan Korea Selatan terhadap Jepang pasca penjajahan.

1.9 Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan masalah sosial dan

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Alex Mintz dan Steven B. Redd, "Framing Effects in International Relations," dalam *Synthese*, 135(2), 193–213, 2003, DOI:10.1023/a:1023460923628

kemanusiaan sebagai pendekatan untuk meneliti suatu masalah. Untuk memahami dan menafsirkan sebuah perilaku atau interaksi sosial merupakan tujuan dari digunakannya metode ini.⁴⁷ Untuk memberikan wawasan dalam proses menjelaskan bagaimana suatu peristiwa, situasi, atau kondisi sosial tertentu menggunakan metode studi kasus.⁴⁸ Penulis memilih untuk menggunakan metode penelitian ini karena topik penelitian yang dilakukan berdasarkan pada suatu fenomena internasional dan penelitian ini dilakukan agar dapat menjelaskan fenomena tersebut.

1.10 Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan data sekunder atau kajian pustaka dan keperpustakaan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini. Penulis menggunakan buku, jurnal, dan artikel berita elektronik melalui internet mengenai informasi serta data-data yang memiliki kaitan dengan Peran Media dalam Mempengaruhi Sikap Terhadap Jepang Pasca Penjajahan menggunakan media portal berita The Jakarta Post dan The Hankyoreh sebagai studi kasus dalam kajian pustaka.

⁴⁷ John W. Creswell, *Research design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*, (California: SAGE Publication, 2013) 13-19

⁴⁸ Darrin Hodgetts dan Otilie Stolte, "Case-based Research in Community and Social Psychology: Introduction to the Special Issue," 2012, DOI:10.1002/casp.2124

1.11 Sistematika Penelitian

Penelitian ini akan dibagi menjadi menjadi empat bab. Bab I berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika pembahasan penelitian.

Bab II akan membahas penjelasan mengenai sejarah kolonialisme Jepang, sejarah pendudukan Indonesia dan Korea Selatan oleh Jepang, kesepadanan Indonesia dan Korea Selatan berdasarkan sejarah dan politik dan penjelasan mengenai perbedaan Indonesia dan Korea Selatan berdasarkan konsep nasionalisme.

Bab III akan akan menjadi bagian analisis dimana penulis akan memperkenalkan media yang digunakan sebagai studi kasus terlebih dahulu. Kemudian penulis akan menganalisis bagaimana peran media membawa pengaruh terhadap sikap Indonesia dan Korea Selatan terhadap Jepang pasca penjajahan melalui studi kasus portal berita sebagai medianya dengan menggunakan paradigma konstruktivisme, *social power theory*, konsep nasionalisme, dan konsep *framing*. Terakhir penulis akan menjelaskan bagaimana gambaran hubungan yang terjalin Indonesia dan Korea Selatan dengan Jepang pasca penjajahan,

Bab IV akan diisi oleh kesimpulan.